

**SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI LIBERAL DAN  
TERCAPAINYA PEMILIHAN UMUM I PADA TAHUN 1955 DI  
INDONESIA**

Ketut Sedana Arta

Universitas Pendidikan Ganesha  
[sedana.arta@gmail.com](mailto:sedana.arta@gmail.com)

**Abstrak**

Penulisan Artikel ini bertujuan untuk (1) mengetahui sistem pemerintahan Demokrasi Liberal di Indonesia dan (2) mengetahui pelaksanaan pemilihan umum I pada tahun 1955. Metode yang digunakan pada penulisan artikel ini adalah metode studi pustaka, yaitu dengan mencari sumber melalui literatur-literatur yang relevan dengan tulisan ini. Dari hasil pencarian data, terungkap bahwa Indonesia pernah melaksanakan Demokrasi Liberal yang berlangsung pada tahun 1950-1959, dengan cirinya yaitu sistem pemerintahan berbentuk sistem parlementer dan menganut sistem multi partai. Dalam pelaksanaan demokrasi liberal, Indonesia mengalami tujuh kali pergantian kabinet. Pencapaian terbesar setelah proklamasi diperoleh pada tahun 1955 yaitu dengan tercapainya program pemilihan umum I yang membawa pengaruh cukup besar dalam berjalannya pemerintahan pada waktu itu.

**Kata Kunci : Demokrasi Liberal, Pemilihan Umum 1955.**

**Abstract**

*The writing of this article aims to (1) find out the Liberal Democracy government system in Indonesia and (2) find out the implementation of the general election I in 1955. The method used in writing this article is the method of literature study, namely by finding sources through relevant literature with this writing. From the results of the search for data, it was revealed that Indonesia had implemented Liberal Democracy which took place in 1950-1959, with its characteristic of being a parliamentary system and adopting a multi-party system. In the implementation of liberal democracy, Indonesia experienced seven cabinet changes. The greatest achievement after the proclamation was obtained in 1955, namely the achievement of the electoral program I which brought considerable influence in the running of the government at that time.*

**Keywords: Liberal Democracy, General Election 1955.**

## Pendahuluan

Proses kembalinya bentuk negara dari RIS menuju NKRI tidak bisa dilepaskan dari dinamika dua pendapat pada triwulan kedua di tahun 1950, yakni pendapat SoesantoTirtoprojo dari PNI yang menganjurkan agar negara-negara RISbergabung dengan Republik Indonesia, sedangkan pendapat kedua dari Moh. Natsiryang dikenal dengan Mosi Integral Natsir yang memberikan pendapat pembentukan negara kesatuan hendaklah dilaksanakan tanpa menimbulkan konflik baik antara negara-negara bagian maupun antara golongan masyarakat kita padaumumnya (Waluyo, 2009), yang pada akhirnya pendapat Natsir dipakai sebagai opsi Kembali ke NKRI

Pada tahun 1950 Indonesia menerapkan sistem demokrasi liberal yang sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementara 1950. Demokrasi liberal berlangsung cukup lama di Indonesia, yaitu pada tahun 1950 hingga Juli 1959. Sistem politik pada demokrasi liberal mendorong untuk lahirnya partai-partai politik.hal ini dikarenakan sistem yang dianut pada masa itu adalah sistem multi partai,

yang dimana banyak partai yang mencoba silih berganti untuk mencoba memegang tampuk kekuasaan eksekutif dan legislatif.

Dalam perjalanan panjangnya demokrasi liberal yang diterapkan di Indonesia telah mengalami tujuh kali pergantian kabinet, tentu saja sering terjadinya pergantian kabinet ini mengakibatkan terjadinya kegoncangan atau ketidak stabilan dalam perjalanan politik Indonesia saat itu. Adapun kabinet yang pernah memerintah pada saat Demokrasi Liberal, yaiyu : Kabinet Natsir (6 September 1950-21 Maret 1951), kabinet Sukiman (27 April 1951-3 April 1952), Kabinet Wilopo (3 April 1952-3 Juni 1953), Kabinet Ali I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955), Kabinet Burharuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956), Kabinet Ali II (20 Maret 1956-4 Maret 1957), dan terakhir Kabinet Djuanda (9 April 1957-5 Juli 1959). Meskipun mengalami silih bergantinya kabinet, namun pencapaian terbesar ke dua setelah Proklamasi Kemerdekaan terlaksana pada demokrasi Liberal, yaitu mengenai Pemilihan Umum pertama

yang dilakukan oleh Negara Indonesia.

Pemilihan umum merupakan sebuah sarana demokrasi, yang dimana kekuasaan lahir berdasarkan hati nurani dan kehendak rakyat, oleh rakyat serta untuk rakyat. Pemilihan umum memiliki tujuan dalam menegakan prinsip kedaulatan rakyat (Waridah, dkk, 2003: 7). Pemilihan umum di Indonesia untuk pertama kalinya disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga kabinet yang berbeda. Persiapannya dilakukan oleh Kabinet Wilopo, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I dan Kabinet Burharuddin Harahap. Pemilu tahun 1955 menggunakan UU Nomor 7 Tahun 1953 tentang pemilihan anggota Konstituante dan Anggota DPR, dan dipersiapkan serta dilaksanakan oleh suatu badan Pemilihan umum yaitu Panitia Pemilihan Indonesia (PPI). Badan pemilu ini bersifat independen karena semua perwakilan politik mempunyai wakilnya di PPI. Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan sistem demokrasi Pancasila dan berlangsung secara

Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia (LUBER) (Dzulfikridin, 2010:106).

Lamanya proses pelaksanaan pemilu disebabkan adanya perselisihan politik antara kabinet yang memerintah dengan pihak oposisi, seperti yang dikemukakan oleh Deliar Noer (1987) yang bahwa lamanya proses terjadinya pemilu karena kentalnya faktor politik seperti adanya pergantian ketua Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) dari Assaat yang digantikan oleh Hadikusumo dari PNI serta tidak diikutkannya Masyumi dalam PPI, sementara NU, PSII, dan Perti yang merupakan partai politik Islam tidak melakukan Tindakan protes. Kebijakan tersebut berlanjut dengan pergantian secara besar-besaran terhadap pejabat-pejabat penting baik pusat maupun daerah.

Faktor pertentangan politik terutama pada masa Burhanuddin Harahap kerap terjadi, PNI sebagai partai oposisi terbesar terus melancarkan kritik terhadap pemerintah, yang mencurigai segala persiapan untuk terselenggaranya pemilu dituding oposisi sebagai upaya pemerintah memenangkan

pemilu secara tidak demokratis, serta dianggap sebagai suatu ancaman terhadap partai-partai di luar partai Islam. Hal tersebut dapat dimaklumi karena Masyumi adalah salah satu partai Islam terbesar di Indonesia.

Tugas menyelenggarakan pemilu memang merupakan tugas yang dibebankan kepada Kabinet Burhanuddin Harahap mengacu pada UU Nomor 7 Tahun 1953 yang ultra demokratis, sehingga konsekwensinya adalah menjamin semua golongan, partai, organisasi bahkan perseorangan untuk menjadi peserta pemilihan umum, Daerah pemilihan terbesar seperti Jawa Tengah, pemilihan umum bahkan diikuti oleh 45 partai politik.

Dengan mengacu pada asas kebersamaan, setiap individu diakui memiliki kesamaan hak dan kedudukannya di hadapan hukum. oleh karena itu pemilihan umum I tahun 1955 semua wakil rakyat dipilih melalui pemilihan umum dan tidak ada yang diangkat. Pemilihan umum 1955 diselenggarakan dua kali yaitu Pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR sedangkan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota

kostituante (Arta & Margi, 2014: 133)

Pada pelaksanaan pemilihan umum 1955 Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan yang meliputi sebanyak 208 daerah kabupaten, 2139 kecamatan dan 42429 desa. Pemilihan pertama ini berjalan dengan demokratis (Arta & Margi, 2014: 133) diikuti oleh banyak partai karena pada saat itu Indonesia sedang menganut kabinet Multipartai.

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan artikel ini adalah bagaimana sistem politik pada saat Demokrasi Liberal hingga terciptanya pemilihan umum I tahun 1955?. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui sistem politik pada saat Demokrasi Liberal hingga terciptanya pemilihan umum I pada tahun 1955.

## **METODE**

Metode yang digunakan adalah metode studi Pustaka yang diperoleh melalui Jurnal Penelitian, Buku, Skripsi, Artikel Ilmiah, dan Internet sebagai sumber dalam pengumpulan informasi untuk

menghimpun fakta-fakta agar menjadi suatu rangkaian tulisan yang menyeluruh.

## **PEMBAHASAN**

### **Demokrasi Liberal di Indonesia dan Sistem Pemerintahannya**

Demokrasi liberal atau (demokrasi konstitusional) adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah (Arta & Margi, 2014: 130). Ciri utama dari demokrasi liberal adalah sering bergantinya kabinet. Hal ini disebabkan oleh jumlah partai yang cukup banyak namun meskipun jumlah partai banyak tidak ada yang memiliki mayoritas mutlak. Sistem pemerintahan yang dianut dan diterapkan pada masa demokrasi liberal adalah sistem parlementer. Sistem parlementer pada demokrasi liberal, Presiden dan wakil Presiden hanyalah sebagai simbol yang tidak memiliki fungsi pemerintahan sehari-hari. Menurut UUDS 1950, kekuasaan legislatif dipegang oleh presiden, kabinet dan DPR (Zulkarnain, 2012: 103). Perdana menteri menjalankan roda pemerintahan sehari-hari serta

memimpin kabinet yang telah disetujui oleh presiden. Akibat dari sistem kepartaian yang menganut sistem multipartai maka partai-partailah yang menjalankan kekuasaannya melalui parlemen.

Pada demokrasi Liberal yang terjadi di Indonesia sering mengalami pergantian kabinet. Pergantian ini hampir terjadi setiap tahunnya yang menandakan bahwa lemahnya kekuatan kabinet sehingga dapat dijatuhkan oleh partai ataupun orang lain.

Berikut kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal:

#### **Kabinet Natsir**

Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang berlangsung pada 6 September 1950- 21 Maret 1951. Adapun program kerja dari kabinet Natsir : menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan pemerintahan, menyempurnakan organisasi angkatan perang, mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat dan menyelesaikan masalah Irian Barat (Arta & Margi, 2014: 130). Adapun hasil yang

diperoleh pada masa kabinet ini adalah berlangsungnya perundingan antara Indonesia-Belanda pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat. Kabinet ini jatuh karena mendapat mosi tidak percaya, dan Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

### **Kabinet Sukiman**

Kabinet Sukiman merupakan kabinet kedua yang berlangsung pada 27 April 1951 - 3 April 1952. Adapun program kerja dari Kabinet Sukiman : menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agrarian agar sesuai dengan kepentingan partai, mempercepat persiapan pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya (Arta & Margi, 2014:131). Hasil yang diperoleh pada masa kabinet ini tidak terlalu signifikan, hal ini dikarenakan kabinet ini meneruskan program kerja dari kabinet sebelumnya. Kabinet ini jatuh karena dianggap melanggar politik bebas aktif dan

lebih condong kepada Amerika Serikat.

### **Kabinet Wilopo**

Kabinet ini berlangsung pada 3 April 1952-3 Juni 1953. Adapun program kerja dari kabinet Wilopo adalah: program dalam negeri menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), meningkatkan kemakmuran rakyat, meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemuliahan keamanan dan program luar negeri penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia serta menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif (Arta & Margi, 2014:131-132). Kabinet Wilopo menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, namun kabinet ini juga bertugas menghapuskan persetujuan dengan Amerika Serikat yang terjadi masa Kabinet Sukiman, dengan cara berusaha memperoleh bantuan dengan syarat-syarat yang kurang mengikat (Ricklefs, 2009: 508). Kabinet ini jatuh karena mendapat mosi tidak percaya yang diajukan kepada parlemen adalah karena Kabinet Wilopo dianggap

gagal dalam menangani pergolakan di daerah.

### **Kabinet Ali Sastroamijoyo I**

Kabinet ini berlangsung pada 31 Juli 1953-12 Agustus 1955. Adapun program kerja dari Kabinet Ali I adalah: meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan pemilu, pembebasan Irian Barat secepatnya, pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB, penyelesaian pertikaian politik hasil yang di peroleh dari kabinet ini adalah persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen yang akan di selenggarakan pada 29 September 1955, dan menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika atau KAA tahun 1955 (Arta & Margi, 2014:133). Pada masa Kabinet Ali I ini peristiwa besar Konferensi Asia Afrika atau (KAA) berhasil diselenggarakan di kota Bandung. Kabinet Ali jatuh karena NU menarik diri dari kabinet, karena persetujuan dengan PNI. Selain itu dikarenakan keadaan ekonomi yang semakin buruk dan korupsi yang mengakibatkan kepercayaan rakyat

merosot pada Kabinet Ali I (Poesponegoro, dkk, 2008: 314).

### **Kabinet Burharuddin Harahap**

Kabinet ini berlangsung pada 12 Agustus 1955-3 Maret 1956. Adapun Program Kerja dari kabinet ini adalah: mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan angkatan darat dan masyarakat kepada pemerintah, melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah di tetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru, masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi, perjuangan pengembalian Irian Barat, politik kerja sama Asia Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif (Arta & Margi, 2014:133).

Hasil yang diperoleh pada masa kabinet ini yaitu, berhasil menyelenggarakan pemilihan umum untuk anggota DPR dan berhasil mengembalikan wibawa pemerintah Republik Indonesia di mata angkatan darat. Kabinet ini jatuh karena Banyak partai yang menarik menteri-menterinya untuk keluar dari kabinet dan akhirnya Burharuddin

mengembalikan mandat kepada presiden.

### **Kabinet Ali Sastroamijoyo II**

Kabinet ini berlangsung pada 20 Maret 1956-4 Maret 1957. Adapun program kerja pada kabinet ini adalah: perjuangan pengembalian Irian Barat, pembentukan daerah – daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota – anggota DPRD, mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, menyetatkan perimbangan keuangan Negara, mewujudkan perubahan ekonomi colonial menjadi nasional berdasarkan kepentingan rakyat. Selain itu program pokoknya adalah pembatalan Konfrensi Meja Bundar, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif, melaksanakan keputusan Konfrensi Asia-Afrika atau KAA. Hasil yang di peroleh dari kabinet ini adalah mendapat dukungan penuh dari Presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and Investment, hasilnya adalah pembatalan seluruh perjanjian Konfrensi Meja Bundar atau KBM (Arta & Margi, 2014:134). Kabinet

ini jatuh karena berkobarnya semangat anti China di masyarakat, munculnya pergolakan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme.

### **Kabinet Djuanda**

Kabinet ini berlangsung 9 April 1957 - 5 Juli 1959. Adapun program kerja kabinet ini adalah: lain membentuk dewan nasional, normalisasi keadaan RI, melancarkan pelaksanaa pembatalan KBM, perjuangan pengembalian Irian jaya, mempercepat proses pembangunan. Hasil yang di peroleh dari Kabinet Djuanda adalah mengatur batas perairan nasional Indonesia melalui deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut territorial. Melalui deklarasi Djuanda ini menunjukkan telah terciptanya kesatuan wilayah Indonesia di mana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat, terbentuknya dewan nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan Presiden sebagai ketuanya (Arta & Margi, 2014:135). Kabinet



ini jatuh ketika Presiden merencanakan dekrit pada bulan Juli 1959. Dekrit Presiden akhirnya dikeluarkan karena konstituante dianggap gagal dan belum mampu membentuk UUD baru sebagai pengganti UUDS terjadi pada tanggal 9 Juli 1959 yang mengakhiri demokrasi liberal di Indonesia.

Berdasarkan paparan di atas sistem demokrasi liberal berakhir pada tahun 1959 yaitu setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden. Meskipun dalam pemerintahan demokrasi liberal mengalami banyak kegoncangan politik yang disebabkan oleh sering bergantinya kabinet karena penerapan sistem multipartai, pada masa ini juga berhasil melahirkan peristiwa besar kedua yaitu Terciptanya pemilihan Umum pertama pada tahun 1955.

### **Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955**

Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu pertama dalam sejarah Republik Indonesia. Pemilu tahun 1955 dimaksudkan untuk memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk di DPR dan Konstituante. Dasar hukum penyelenggaraan

Pemilu tahun 1955 adalah UUD S 1950, khususnya pasal 1 ayat 2 dan pasal 35 (Badruzzaman Busyairi, 1984 : 87)

Setiap partai yang ikut dalam pemilu 1955 berusaha meraih simpati masyarakat dengan berbagai cara sehingga menimbulkan pertentangan politik diantara partai-partai besar. Beberapa metode kampanye yang dipergunakan adalah melalui pemuteran film, aktif dalam berbagai perayaan hari besar keagamaan, perayaan ulang tahun, pawai, pemasangan pamphlet partai, kampanye dari tingkat nasional sampai tingkat desa untuk memenangkan pemilu (Ajeng Kusumaning Ayu dan Muryadi (2017)

Pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan demokrasi agar rakyat bisa merasakan dalam kehidupan bernegara. Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, selama dipimpin oleh bapak proklamator (Ir. Soekarno) yang melewati beberapa era, mulai dari revolusi fisik, menjalankan sistem demokrasi parlementer dan juga sistem demokrasi terpimpin, hanya sekali

diselenggarakannya pemilu, yaitu pemilihan tahun 1955. Pemilihan umum I didorong oleh situasi yang ada pada saat itu, yaitu terjadinya pergantian kabinet secara terus-menerus dan menimbulkan instabilitas politik Indonesia. Kabinet yang memerintah pada saat itu memiliki umur yang pendek hal ini didasari oleh asas multipartai yang berlaku pada saat itu. Dengan melihat kejadian tersebut akhirnya pemerintah mengambil tindakan dengan mengeluarkan UU No. 7 Tahun 1953 tentang pemilihan umum anggota DPR, keberadaan pemilihan umum dalam usaha penyederhanaan partai politik mempunyai dua tujuan, yaitu : untuk melaksanakan prinsip demokrasi dan mencapai stabilitas politik. Terlaksananya pemilihan umum tahun 1955 didasari atas latar belakang sebagai berikut :

1. Revolusi fisik atau perang kemerdekaan, menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan.
2. Pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian.

3. Belum adanya Undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan pada 4 April 1953.

Pemilihan umum tahun 1955 merupakan pemilihan umum yang disiapkan dan diselenggarakan oleh tiga kabinet yang berbeda. Perancangannya dilakukan oleh kabinet Wilopo, Persiapan untuk pemilihan umum mulai diadakan oleh kabinet Ali Sastroamijoyo I, yaitu dengan membentuk panitia pemilihan umum, baik untuk pusat maupun daerah. Pada tanggal 16 April 1955 Hadikusumo selaku ketua panitia pemilihan umum pusat mengumumkan bahwa pemilihan umum I di Indonesia akan dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante (Poesponegoro, dkk, 2008: 314). Dengan adanya pengumuman mengenai tanggal pemilihan maka partai-partai politik mulai meningkatkan kampanyedengan berusaha mendapatkan suara terbanyak. Kabinet Ali Sastroamijoyo I

merupakan kabinet yang bertahan paling lama diantara kabinet-kabinet sebelumnya, namun pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamijoyo I mengembalikan mandatnya. Meskipun kabinet Ali I jatuh, waktu yang telah ditetapkan oleh kabinet Ali Sastroamijoyo I tidak mengalami perubahan dan direalisasi oleh kabinet Burharuddin Harahap. Pemilihan umum tahun 1955 menggunakan sistem proposional, yaitu setiap daerah pemilihan mendapat sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya.

Pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Hasil pemilihan umum tahap I ini ternyata dimenangkan oleh empat partai yaitu, PNI, Masyumi, NU, dan PKI sedangkan partai-partai lain mendapatkan suara lebih kecil daripada keempat partai tersebut (Poesponegoro, dkk, 2008: 317). Pemilihan umum untuk konstituante dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955. Suasana dalam menghadapi pemilihan ini jauh lebih

tenang dibandingkan pada saat pemilihan DPR, rupanya rakyat sudah memiliki pengalaman yang cukup dan ketegangan dapat diatasi dengan baik. Hasil dari pemilihan anggota dewan konstituante bahwa dukungan terhadap PNI, NU dan PKI meningkat, sementara masyumi yang menjadi pemenang kedua pada saat pemilihan DPR mengalami kemerosotan perolehan suara. Melalui berbagai perdebatan, pergantian beberapa kabinet dan pembahasan terhadap naskah perundang-undang pemilu, lahirnya pemilihan umum dapat dilaksanakan.

Peserta dalam pemilihan umum 1955 dapat digolongkan berdasarkan ideologinya antara lain :

- (1). partai politik yang beraliran nasionalis antara lain: PNI, IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), Partai Rakyat Nasional, PPRI, PERMAI, Partai persatuan Daya, dan lain-lain.
- (2). Partai Politik Beralirkan Islam, antara lain: NU, PSII, Partai Islam Perti, PPTI.
- (3). Partai Politik beraliran komunis, antara lain : PKI dan ACOMA.
- (4). Partai Politik beraliran sosialis, antara lain: PSI, Partai Murba, Partai Rakyat Desa dan Baperki.
- (5). Partai

yang beraliran Kristen/Nasrani antara lain: Partai Kristen Indonesia dan Partai Katol

Pemilu 1955 diikuti oleh 118 peserta untuk DPR dan 91 peserta untuk konstituante. Para peserta itu ada yang berbentuk partai, golongan atau kelompok, bahkan ada peserta perseorangan dan gabungan perseorangan yang memang diperbolehkan pada masa itu. Dalam pemilu ini, wilayah ini, wilayah Indonesia dibagi dalam 15 daerah pemilihan, namun tidak semua peserta pemilu yang banyak itu ikut di semua daerah pemilihan, Hanya Masyumi, PNI, PKI, PSII dan PSI yang ikut setiap daerah pemilihan (Alfian, 1971: 4). Dari sisi persiapan pemilu 1955 telah mempunyai struktur yang baik hal ini dapat dikaji dari dokumen Boyd R. Compton (1993) yang mendeskripsikan bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu jenjang panitia-panitia pemilihan di lima tingkat, meliputi: (1) Panitia Pemilihan Indonesia, terdiri dari lima sampai Sembilan anggota-anggota yang ditunju oleh presiden; (2) Panitia Pemilihan Daerah, panitia yang terdiri dari lima sampai

sembilan anggota di tiap-tiap daerah dalam enambelas daerah pemilihan, ditunjuk oleh Menteri Kehakiman;(3) Panitia Pemilihan Kabupaten, terdiri dari li,a sampai Sembilan anggota, ditunjuk oleh gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri, diketahui oleh Bupati; (4) Panitia Pemilihan Kecamatan, sedikitnya terdiri dari lima orang ditunjuk oleh Panitia Kabupaten, atas nama Menteri Dalam Negeri diketuai Camat; (5) Panitia Pemilihan Desa, sedikitnya tiga anggota ditunjuk oleh camat, diketuai oleh Kepala Desa.

Jumlah Penduduk Indonesia 77.987.979 dan yang mempunyai hak pilih berjumlah 43.104.464. Suara yang sah berjumlah 37.787.569 suara untuk DPR dan 37.837.111 suara untuk konstituante. Tidak semua kontestan pemilu mendapatkan kurdi di DPR atau di Konstituante. Hanya 28 kontestan pemilu yang mendapatkan kursi di DPR, sedangkan di konstituante ada 34 kontestan yang mampu meraih kursi (Soebagio, 1980)

Dunia internasional mengakui kelebihan dan kekurangan pemilihan Umum tahun 1955 merupakan pemilihan umum

pertama yang terselenggara di Indonesia, melihat dari hal tersebut ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan pemilu tahun 1955, Adapun kelebihan dan kekurangan dari pemilu ini adalah sebagai berikut: Kelebihan :

(1)Tingkat partisipasi rakyat sangat besar. (2) Presentase suara sah yang besar, padahal 70% penduduk Indonesia buta huruf. (3) Pemilu berjalan aman, tertib, dan disiplin serta jauh dari unsur kekerasan dan kecurangan. Namun Pemilu tersebut juga memiliki kekurangan-

kekurangan seperti: (1) Adanya krisis ketatanegaraan, (2) Tidak adanya partai politik yang memperoleh suara mayoritas mutlak. (3) Banyak menimbulkan kekecewaan di partai politik.

Hasil pemilihan umum 1955 menunjukkan persaingan sengit antara empat partai seperti PNI, Masyumi, NU dan PKI.. Tidak ada kontestan yang mampu meraih kemenangan dengan mutlak atau secara mayoritas. Perolehan suara empat besar dalam Pemilu 1955 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perolehan suara, prosentase, dan Jumlah Kursi DPR Pemilu 1955

Nama Partai	Jumlah Suara yang Diperoleh	Persentase	Jumlah Kursi di Parelemen (DPR)
<b>PNI</b>	8.434.653	22,3 %	57
<b>Masyumi</b>	7.903.886	20,9 %	57
<b>NU</b>	6.955.141	18,4 %	45
<b>PKI</b>	6.176.914	16,4 %	39
<b>Lain-lain</b>	8.314.705	22,0 %	59

Sumber: Dikutif dari Kacung Marijan, Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926, Jakarta : Erlangga, 1992: 74

Dari Pemilu 1955, dibentuklah partai koalisi antara PNI, Masyumi, dan NU tanpa melibatkan PKI. Kabinet ini dipimpin oleh Mr. Ali Sastroamidjojo (PNI) sebagai Perdana Menteri, Mr. Mohammad

Roem (Masyumi) sebagai Wakil PM 1, K.H. Idham Chalid (NU) sebagai Wakil PM II. Oleh karena itu, cabinet ini dikenal dengan nama Kabinet ALI II atau Kabinet Ali-Roem-Idham.

Hasil Pemilu 1955 menunjukkan bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (88%), tidak semua penduduk Indonesia menyalurkan aspirasinya pada partai atau golongan Islam. Pada pemilu ini, partai dan kelompok Islam hanya memperoleh 116 kursi (45,2%) dari 257 kursi parlemen yang diperebutkan. Namun jika

dibandingkan dengan jumlah wakil partai-partai Islam di DPR sementara (sebelum pemilu) yang hanya berjumlah 57 orang di DPR sementara sementara (sebelum pemilu), maka sebenarnya hasil itu mengalami kenaikan yang cukup besar. Perolehan suara dan kursi di DPR (Parlemen) bagi setiap partai atau kelompok Islam adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Jumlah Suara, Prosentase, dan Kursi DPR dari Partai Islam

Nama Partai	Jumlah Suara yang Diperoleh	Persentase	Jumlah Kursi di Parlemen (DPR)
<b>Masyumi</b>	7.903.886	20,9 %	57
<b>NU</b>	6.955.141	18,4 %	45
<b>PSII</b>	1.091.160	2,9 %	8
<b>Perti</b>	483.014	1,3 %	4
<b>PPTI</b>	85.131	0,3 %	1
<b>AKU</b>	81.454	0,2 %	1

Sumber: Diolah dari Miriam Budirdjo. *Demokrasi di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996 : 74

Sedangkan untuk anggota Konstituante, perolehan suara partai-partai Islam mengalami penurunan yakni 16.464.008 suara dan memperoleh 228 kursi dari 514 kursi yang diperebutkan. Dalam Pemilu 1955 ini, Masyumi paling kecewa karena sebelumnya berharap besar akan menang dengan

suara mutlak. Harapan tersebut dianalisis dari keanggotaan Masyumi berjumlah 40 juta. Menurut Zulfikridin (2010: 109) analisis tersebut berlebihan mengingat jumlah penduduk yang memiliki hak suara berjumlah 43.104.463 jiwa. Hal lain yang menyebabkan melesetnya perkiraan

tersebut karena tersebarnya pemilih ke berbagai peserta pemilu, khususnya PNI dan NU. Adapun partai yang paling puas terhadap hasil pemilu adalah PKI karena berhasil membuat kejutan dengan menambah jumlah kursi di parlemen, NU dari 8 menjadi 45, sedangkan PKI dari 17 menjadi 39.

Masyumi mendapat kursi sama banyak dengan PNI di DPR, meskipun PNI mendapatkan suara yang lebih banyak karena keunggulan masyumi lebih merata. PNI hanya menang di daerah pemilihan Jawa Tengah, sedangkan Masyumi menang di 10 daerah pemilihan. Adapun NU menang di daerah pemilihan Jawa Timur dan NTB. Berdasarkan hal ini, berarti Masyumi merupakan partai yang lebih didukung secara luas dan merata di seluruh Indonesia. Keberhasilan tersebut menurut Abdul Munir dan Boyd R. Compton disebabkan kepemimpinan Natsir, sehingga Masyumi berada pada posisi teratas dari seluruh perolehan suara partai-partai Islam sepanjang sejarah pemilu di Indonesia (Abdul Munir Mulkhan, 1994: 141). Namun secara keseluruhan pada pemilu

1955 perolehan suara partai-partai Islam berjumlah 45% dari seluruh suara yang masuk. Hal tersebut sangat mempengaruhi kelancaran dalam memperjuangkan cita-cita partai tersebut dalam parlemen maupun dalam majelis konstituante, realitas tersebut segera terlihat pada perdebatan tentang negara dalam konstituante (Maarif, 1987 : 124)

### **KESIMPULAN**

Demokrasi Liberal di Indonesia berlangsung pada tahun 1950 sampai dengan 1959, dalam pelaksanaannya sistem pemerintahannya menganut sistem parlementer. Demokrasi ini memiliki ciri yang sangat kental mengenai sistem multi partai yang dianut namun tidak adanya partai politik yang memiliki mayoritas mutlak. Pada sistem ini juga usia kabinet dalam setiap pemerintahannya sangat pendek menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet.

Pada masa ini pencapaian besar ke dua setelah proklamasi berhasil diperoleh yaitu dengan tercapainya Pemilihan Umum pada tahun 1955 yang pesertanya berasal

dari berbagai partai yang ada pada saat itu di Indonesia. Pemilihan ini berhasil terlaksana melalui dua tahap, yaitu tahap pertama pada tanggal 29 September 1955 melangsungkan pemilihan DPR dan

tanggal 15 Desember 1955 melangsungkan pemilihan Anggota Dewan Konstituante. Adapun empat besar pemenang pemilu 1955 meliputi : PNI, Masyumi, NU dan PKI

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku:

- Abdul Munir Mulkhan. 1994. *Runtuhnya Politik Santri: Strategi Kebudayaan dalam Islam*. Yogyakarta : Sippres
- Ahmad Syafii Maarif. 1987. *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante 1956-1959*. Jakarta : LP3ES
- Alpian. 1971. *Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat*. Jakarta : Leknas
- Anwar Harjono. 1997. *Perjalanan Politik Bangsa: Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan*. Jakarta : Gema Insani Press
- Arta, Sedana dan Margi. 2014. *Sejarah Indonesia Dari Proklamasi Sampai Orde Baru*. Yogyakarta:GrahaIlmu
- Baduzzaman Busyairi. 1989. *Boerhanuddin Harahap: Pilar Demokrasi*. Jakarta : Bulan Bintang
- Boyd R. Compton. 1993. *Kemelut Demokrasi Liberal Surat-surat Rahasia Boyd R. Compton*. Jakarta : LP3ES
- Deliar Noer. 1987. *Partai Islam di Pentas Nasional*. Jakarta : Grafiti
- Dzulfikiddin, M. 2010. *Mohammad Natsir Dalam Sejarah Politik Indonesia*. Bandung : Midzan
- Kacung Marijan. 1992. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta : Erlangga,
- Miriam Budiardjo. 1996. *Demokrasi di Indonesia: Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer (suatu pengalaman)*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI
- Poesponegoro, Marwati Djoened, dan Notosusanto. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia VI Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia (1942-1998)*. Jakarta:Balai Pustaka.
- Ricklefs, M. C. 2009. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi Ilmu
- Soebagio,I.N.1980. *Jusup Wibisono: Karang di Tengah Gelombang*. Jakarta : Gunung Agung
- Waluyo. 2009. *Dari Pemberontak menjadi Pahlawan Nasional Mohamad Natsir dan Perjuangan Politik di Indonesia*
- Waridah, Siti, dkk. 2003. *Sejarah Nasional dan Umum*. Yogyakarta: Bumi Aksara



Zulkarnain. 2012. *Jalan Meneguhkan Negara Sejarah Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Puncung Pers

**Jurnal:**

Ajeng Kusumaning Ayu dan Muryadi. 2017. PNI dalam Pemilu 1955 di Jakarta. Dalam Jurnal VERLEDEN Jurnal Kesejarahan, Vol. 10 No.1, Juni 2017

Johan Setiawan, dkk. 2018. *SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL TAHUN 1950-1959*. Dalam Jurnal HISTORIA Volume 6,

Nomor 2, Tahun 2018. ISSN 2337-4713

Winda Rizky Nur Lutfiana. 2017. *Usaha-usaha kegagalan Pemilihan Umum Pertama Tahun 1955*. Dalam Jurnal AVATARA Volume 5, Nomor 1, Tahun 2017.

**Internet:**

Serafica Gischa. 2020. *Sejarah Pemilu 1955 di Indonesia*. Dalam <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.co/skola/read/2020/02/06/170000669/sejarah-pemilu-1955-di-indonesia>. Diunduh pada tanggal 1 Juli 2020, pukul 23.45 WITA